

Dinkes DKI Mulai Vaksinasi Cacar Monyet Dosis Kedua

JAKARTA (IM) - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mulai melaksanakan vaksinasi cacar monyet dosis kedua, Selasa (21/11). Sasaran penerima adalah 495 orang yang sebelumnya telah disuntik dosis pertama.

"Jadi untuk 495 orang sudah aman untuk dosis pertama. Minggu ini kami mulai dosis kedua mulai dari 21 November 2023," ujar Kepala Seksi Surveilans Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta, Ngabila Salama saat dikonfirmasi, Selasa (21/11).

Menurut Ngabila, stok vaksin untuk penyakit cacar monyet yang dimiliki Dinkes DKI masih mencukupi. Sebab, sejak awal telah disediakan 1.000 dosis vaksin yang bisa dipakai untuk dua kali penyuntikan.

"Awalnya kan 1.000 dosis ini untuk dosis pertama

dan kedua untuk 450 orang. Pengadaan dari Kemenkes," kata Ngabila.

Adapun sampai saat ini terdapat 39 kasus cacar monyet di Jakarta. Dari jumlah itu, satu kasus di antaranya merupakan pasien positif pada Agustus 2022 dan kini telah sembuh. Sementara 38 pasien lainnya merupakan pasien positif yang ditemukan sejak Oktober 2023. Sebanyak 22 orang di antaranya masih menjalani isolasi di rumah sakit.

Untuk 16 pasien lainnya dilaporkan telah selesai menjalani isolasi dan kini masih dalam pemantauan Dinkes DKI.

Seluruh pasien positif cacar monyet itu berjenis kelamin laki dengan rentang usia 25 - 50 tahun. Para pasien tersebut disebut tertular lewat kontak sosial dan kondisinya bergejala ringan. ● yan

4 | Metropolis

FOTO/ANTARA



HARI IKAN NASIONAL 2023

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (tengah) memotong ikan Tuna pada acara Hari Ikan Nasional 2023 di Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (21/11). Harkanas 2023 mengambil tema Ikan Untuk Generasi Emas.

DILANTIK JADI ANGGOTA DPRD DKI Shinta Akan Perjuangkan Pemerataan Air Bersih Warga Jakarta Utara

JAKARTA (IM) - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Shinta Yosefina memperjuangkan pemerataan air bersih untuk wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Tugas kedewanan itu mulai dilakukan Shinta setelah dilantik dalam rapat paripurna di DPRD DKI Jakarta pada Senin (20/11).

"Pertama dan paling banyak dikeluhkan masyarakat Jakarta Utara, di Cilincing itu soal air PAM," kata Shinta dalam keterangannya, Selasa (21/12).

Shinta mengatakan, sampai saat ini, banyak warga di Cilincing tidak mendapatkan air bersih karena aliran dari PAM sudah mati sejak be-

berapa waktu lalu. "Bahkan ada yang sudah satu tahun tapi tak ada penyelesaian," kata Shinta.

Shinta sudah mendengar aspirasi masyarakat di Cilincing sejak dua bulan lalu, saat belum resmi menjadi anggota DPRD DKI. Menurut Shinta, upaya itu dilakukan dengan harapan setelah resmi menjadi anggota DPRD, kebutuhan warga akan air bersih bisa langsung ditindaklanjuti. "Akan saya *follow up* agar segera dilakukan pemasangan perpipaan secepatnya," kata Shinta.

Untuk diketahui, Shinta menggantikan posisi rekan satu partainya, Anthony Winza Probowo, yang mengundurkan diri DPRD

DKI Jakarta.

Shinta telah mengucapkan sumpah serta janji untuk menjadi anggota DPRD DKI Jakarta melalui mekanisme penggantian antarwaktu (PAW). "Demi Tuhan, saya bersumpah, berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan UUD 1945...," ucap Shinta. Setelah selesai membacakan sumpah dan janji, Shinta menandatangani berita acara rapat paripurna PAW Anggota DPRD DKI Jakarta. ● yan

Pemprov DKI Diminta Buat Rumah Sakit Khusus Pecandu Judi Online

Pemprov DKI diminta untuk membangun rumah sakit khusus bagi masyarakat yang kecanduan judi online. Permintaan tersebut didapatkan dari resepsionis ketiga pada 25 September sampai dengan 27 Oktober 2023 lalu, kata Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Setyoko.

JAKARTA (IM) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membangun rumah sakit khusus.

Adapun rumah sakit khusus tersebut nantinya diperuntukkan bagi masyarakat yang kecanduan judi online.

Permintaan tersebut didapatkan dari resepsionis ketiga pada 25 September sampai dengan 27 Oktober 2023 lalu.

"Mengusulkan rumah sakit khusus untuk pecandu judi online," ujar Anggota DPRD Fraksi Gerindra, Setyoko saat Paripurna di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat,

Selasa (21/11).

Tak sampai di situ, wakil rakyat Jakarta ini juga mendorong Eksekutif melalui Dinas Kesehatan agar menyediakan Fasilitas-fasilitas Kesehatan untuk setiap Posyandu yang ada di tiap RW dan Kelurahan serta menyediakan makanan yang bergizi dan susu penuh nutrisi untuk menghindari gizi buruk untuk Ibu dan anak agar terhindar dari gejala anak stunting.

"Serta kemudahan biaya untuk terapi dan bantuan posbindu gratis," imbuhnya.

Selain itu, Legislatif Kebon Sirih ini berharap Pemprov DKI juga dapat menyiapkan program yang bisa menenangkan ibu baru atau new mom.

"Warga mengharapkan agar rumah sakit, Puskesmas, Posyandu, dan Pusat Kesehatan lainnya mengadakan program Penuluhan tentang baby blues, mental health untuk new mom," ujar Setyoko.

Untuk itu, Setyoko berharap usulan ini dapat menjadi pertimbangan bagi eksekutif dalam membangun Jakarta sebagai kota global.

"Laporan ini akan kami sampaikan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta untuk dijadikan bahan masukan dan evaluasi serta kajian lebih lanjut dalam tahapan perencanaan Program Musrenbang dan penyusunan RAPBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," pungkasnya. ● yan

Pemilihan Pekerja Teladan & LKS Bipartit Terbaik Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2023

Pemilihan Pekerja Teladan dan LKS Bipartit Terbaik Tingkat Kabupaten Bogor tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Bidang Hubungan Industrial dan Syarat Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor.

Dengan Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat



dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Untuk mencapai harapan dimaksud Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menginisiasi Pemilihan Pekerja Teladan dalam rangka Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, sekaligus apresiasi pada capaiannya.

Maksud diselenggarakannya kegiatan pemilihan pekerja teladan yaitu untuk lebih

meningkatkan etos kerja, disiplin dan produktivitas kerja serta tumbuhnya rasa cinta dan bangga terhadap profesi dalam bidang pekerjaannya.

Tujuan memberikan penghargaan kepada para pekerja atas prestasi, dedikasi dalam melaksanakan profesinya, dengan harapan pekerja teladan akan mampu menumbuhkan disiplin se-

nantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab, produktivitas kerja, dapat memelihara citranya, berperilaku baik serta memberi contoh/suri teladan dalam lingkungannya.

Dalam tahap 1 kualifikasi administrasi Pemilihan Pekerja Teladan, terdapat 15 peserta yang lolos sebagai berikut :

1. PT. Panasonic Gobel Life Solutions Manufacturing Indonesia
2. PT. Ricky Garmen Exportindo
3. PT. Taitat Putra Rejeki
4. PT. Karya Mitra Seraya
5. PT. Indocement Tunggul Prakasa, Tbk
6. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk Plant Gunung Putri
7. PT. Darya Varia Laboratoria Tbk Plant Citeureup

8. PT. Nandya Karya Perkasa
9. PT. Sumber Alfaria Trijaya, Tbk Cabang Parung
10. PT. Sreeya Sewu Indonesia
11. PT. Unggul Karya Semesta (UKS)
12. PT. Voksel Electric Tbk
13. PT. Sunkat Indonesia
14. PT. Banteng Pratama Rubber
15. PT. American Standard

Adapun mekanisme kegiatan pemilihan pekerja teladan dilaksanakan mulai dari Seleksi Administrasi, Tes Tertulis, Wawancara, Penyusunan Makalah dan Presentasi, Kunjungan verifikasi ke Perusahaan tempat bekerja calon pekerja teladan.

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun 2023

Kompetisi global menuntut setiap negara mandiri dengan memiliki daya saing *human capital* yang tinggi dan mampu memenangkan akses terhadap berbagai peluang yang tercipta dari globalisasi.

Persaingan global juga membuka kesempatan pertukaran tenaga kerja antar negara. Di satu sisi hal ini sangat menguntungkan karena dapat membuka peluang bekerja lebih luas dan semakin beragam bagi seluruh warga Indonesia.

Namun di sisi lain, membuat lalu lintas tenaga kerja antar negara menjadi semakin mudah. Sehingga, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pun kian sengit.

Tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia menuntut untuk menyiapkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi. Sumber daya manusia unggul adalah kelompok angkatan kerja Indonesia yang profesional, produktif, mampu bersaing, dan siap menghadapi tantangan global serta revolusi industri 4.0 saat ini.



Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia yang mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan.

Setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan dan dalam hal ini diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

Pengisian kebutuhan ja-

batan-jabatan tertentu dalam pekerjaan yang belum dapat dipenuhi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dapat diisi oleh Tenaga Kerja Asing (TKA), yaitu warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor, Zaenal Ashari, S.Sos., M.M., (Rabu, 15/3), di Bumi Gumati *Convention Resort*, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor pada pembukaan kegiatan *Forum Group Discussion (FGD) Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Tahun 2023*.

Penggunaan TKA secara filosofis lekat dengan asas manfaat, aspek keamanan, dan aspek legalitas, yaitu masuknya TKA harus mendapatkan izin kerja dari pemerintah dalam hal ini kementerian ke-

tenagakerjaan. Hal ini sejalan dengan tujuan penggunaan tka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang profesional di bidang tertentu yang belum dapat terisi oleh TKI dan untuk percepatan alih teknologi dan alih keahlian serta peningkatan investasi.

Oleh karena itu penggunaan TKA di Indonesia tidak dapat dihindari, dan pada prinsipnya penggunaan TKA di Indonesia adalah mereka yang dibutuhkan dalam dua hal yakni TKA yang membawa modal (sebagai investor) dan membawa skill dalam hal *transfer of knowledge*. Selain kedua hal tersebut maka pada hakekatnya tidak diperkenankan dan harus mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

Dalam mempekerjakan TKA, dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang sangat ketat agar dapat diken-

dalikan dan diawasi antara lain dengan cara mewajibkan bagi perusahaan atau korporasi pengguna TKA membuat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) untuk jabatan dan jangka waktu tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Guna mewujudkan terciptanya iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi TKI, selain dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, pembinaan penggunaan TKA juga dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor sesuai dengan

kewenangannya.

Sedangkan pengawasan penggunaan TKA dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan pada Kementerian dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat serta pejabat imigrasi yang bertugas di bidang pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Sebanyak 40 (empat puluh) orang perwakilan *Human Resource Development (HRD)* perusahaan pengguna TKA mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan materi yang disampaikan narasumber dari Direktorat Pengendalian Penggunaan TKA Kementerian Ketenagakerjaan RI; Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor; dan Kantor Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Provinsi Jawa Barat. Penyelenggaraan FGD ini merupakan upaya pembi-

naan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam membina perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Bogor selain sebagai forum untuk diseminasi peraturan, kebijakan, dan mekanisme pengendalian penggunaan TKA, serta pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran baik peraturan penggunaan TKA maupun keimigrasian bagi perusahaan pengguna TKA di wilayah Kabupaten Bogor dan TKA itu sendiri.

Selain itu melalui kegiatan ini diharapkan dapat terjalin komunikasi, terbagun koordinasi, konsolidasi, serta sinergitas antara pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kantor Imigrasi, dan Pengawas Ketenagakerjaan agar senantiasa dapat bekerjasama dengan baik untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada perusahaan pengguna TKA maupun untuk pengendalian penggunaan TKA di wilayah Kabupaten Bogor. ● Adv